

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada Pemilu Presiden 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan ruang digital telah melaksanakan berbagai strategi untuk menangani penyebaran hoaks yang berpotensi mengganggu jalannya proses demokrasi. Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang saling terintegrasi, mulai dari pemantauan informasi digital, verifikasi dan klarifikasi informasi, penindakan terhadap konten hoaks, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga pelaksanaan program edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Komdigi tidak bekerja secara mandiri, tetapi melibatkan Bawaslu, KPU, Mafindo, platform digital, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pengawasan informasi di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan Komdigi cukup efektif dalam menekan penyebaran hoaks selama Pemilu Presiden 2024. Namun, pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan persebaran hoaks karena karakter media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, munculnya kembali akun-akun penyebar hoaks setelah dilakukan penindakan, serta berkembangnya bentuk hoaks yang semakin kompleks akibat pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dan *deepfake*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengawasan digital pada Pemilu Presiden 2024 jauh lebih kompleks dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga menuntut mekanisme pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perkembangan mekanisme verifikasi yang diterapkan Komdigi dalam menangani hoaks pada Pemilu Presiden 2024. Berbeda dengan mekanisme pada Pemilu 2019 yang lebih mengandalkan hasil pemantauan internal dan koordinasi antarlembaga, mekanisme verifikasi pada Pemilu Presiden 2024 dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu pemantauan *Artificial*

Intelligence System (AIS) yang bekerja selama dua puluh empat jam, laporan masyarakat melalui AduanKonten.id, serta eskalasi laporan dari Bawaslu, KPU, Mafindo, dan berbagai mitra strategis lainnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses verifikasi tidak lagi hanya bersifat institusional, tetapi berkembang menjadi proses yang lebih kolaboratif dengan melibatkan berbagai aktor dalam ekosistem pengawasan digital. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai tantangan akibat meningkatnya penggunaan AI dan teknologi *deepfake*, sehingga proses verifikasi fakta dituntut menjadi lebih cepat, akurat, dan adaptif dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pengawasan digital tidak hanya ditentukan oleh kapasitas Komdigi sebagai institusi negara, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kerja sama dengan platform digital, organisasi pemeriksa fakta, dan tingkat literasi digital masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan masih adanya keterbatasan regulasi dalam mengikuti perkembangan teknologi, keterbatasan kewenangan Komdigi terhadap platform digital, serta luasnya ruang digital yang harus diawasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu dievaluasi agar sistem pengawasan informasi dapat semakin responsif terhadap perkembangan teknologi dan pola penyebaran hoaks pada pemilu berikutnya. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan pengendalian yang hanya mengandalkan *takedown* konten tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika penyebaran hoaks di era digital. Oleh karena itu, strategi penanganan hoaks perlu bergeser ke arah pendekatan yang lebih preventif melalui *prebunking*, penguatan literasi digital, serta peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melakukan moderasi konten secara mandiri. Pergeseran strategi tersebut diharapkan mampu membangun ketahanan informasi masyarakat sehingga hoaks dapat dicegah sebelum menyebar secara luas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Komdigi tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas dan pengendali ruang digital, tetapi juga sebagai aktor yang membangun ketahanan informasi publik dalam demokrasi digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan hoaks terus berkembang mengikuti perubahan karakteristik ruang digital, khususnya melalui penguatan mekanisme verifikasi

yang lebih kolaboratif dibandingkan periode pemilu sebelumnya. Keberhasilan penanganan hoaks pada pemilu mendatang tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan mendukung kualitas demokrasi di Indonesia.

5.2 Saran Praktis

5.2.1 Saran Praktis

Program literasi digital yang dilakukan oleh Komdigi perlu diperkuat dan dilaksanakan secara lebih masif, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu. Kegiatan literasi tidak hanya perlu difokuskan pada generasi muda, tetapi juga pada kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap hoaks, seperti generasi yang sebelumnya terbiasa memperoleh informasi dari media konvensional. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memilah, memverifikasi, dan mengkritisi informasi yang diterima di ruang digital. Strategi penanganan hoaks juga perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih preventif melalui program prebunking atau imunisasi informasi. Upaya ini penting dilakukan karena penyebaran hoaks di media sosial berlangsung sangat cepat, sehingga tindakan take down sering kali dilakukan setelah informasi tersebut terlanjur diterima dan disebarluaskan oleh masyarakat. Melalui prebunking, masyarakat dapat dipersiapkan untuk mengenali pola-pola disinformasi sebelum hoaks tersebut beredar secara luas.

Penguatan kapasitas teknologi pengawasan perlu terus dilakukan oleh Komdigi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan deepfake. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menyebabkan bentuk hoaks menjadi lebih kompleks dan sulit dibedakan dari informasi yang benar, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Platform digital juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam melakukan moderasi konten secara mandiri dan tidak hanya menunggu permintaan penghapusan dari pemerintah. Sebagai penyedia layanan digital, platform memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap aman serta meminimalkan

penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan disinformasi dan polarisasi di masyarakat.

5.2.2 Saran Teoritis

Kajian mengenai pengawasan digital masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, khususnya dalam konteks hubungan antara pengawasan informasi, kebebasan berekspresi, dan kualitas demokrasi di era digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak kebijakan pengawasan digital terhadap hak-hak digital masyarakat serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian mengenai penanganan hoaks juga dapat dikembangkan dengan melihat peran aktor lain dalam ekosistem digital, seperti platform digital, organisasi pemeriksa fakta, maupun masyarakat sebagai pengguna media sosial. Dengan demikian, pemahaman mengenai penanganan hoaks tidak hanya berfokus pada perspektif pemerintah, tetapi juga mencakup perspektif para aktor yang terlibat dalam proses pengawasan dan pengelolaan informasi di ruang digital.